

EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENINGKATKAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DESA

Roki Gentara¹, Rosyidah Rachman², Suprianto^{3*}

¹²³Universitas Samawa, Sumbawa Besar, Indonesia

Penulis Korespondensi: antobalong83@gmail.com

Article Info

Article History

Received: 11 November 2023

Revised: 14 Desember 2023

Published: 31 Desember 2023

Keywords

Effectiveness;
Family Hope Program (PKH);
Social Economy.

Abstrak

This research aims to determine the effectiveness of the Family Hope Program (PKH) in improving the socio-economic status of the Baturrotok Village community. This research is descriptive with a quantitative approach. The type of data used in this research is quantitative data in the form of respondents' answer scores obtained directly from primary sources using a questionnaire as a data collection instrument. In this research, the sample chosen was 10% of the total beneficiaries of the Family Hope Program (PKH) in Baturrotok Village, totaling 345 heads of families, so the respondents were 35 heads of families. Measuring the level of program effectiveness uses simple statistical methods, and classifying the level of program effectiveness can be done using standards in accordance with the Ministry of Home Affairs' R&D reference. The results of this research indicate that the level of effectiveness of the PKH program in improving the socio-economic status of the Baturrotok Village community is in the quite effective category. This means that the implementation of the PKH program in Baturrotok Village has been carried out quite well, although improvements and enhancements are still needed in several aspects, namely socialization activities and monitoring of the PKH program. Success in implementing the PKH program is very important so that poor people can gain benefits, especially access to education, health and social sectors so that the goal of the PKH program in improving the socio-economic status of the community can be achieved optimally.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan bermartabat. Kondisi ketidak mampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa sandang, pangan, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak pada berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.

Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memperoleh kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, pakaian, makanan, dan obat-obatan. Lebih lanjut Bappenas mendefinisikan kemiskinan sebagai keadaan dimana individu atau sekelompok laki-laki dan perempuan tidak mampu mencukupi hak-hak dasarnya untuk mengembangkan dan mempertahankan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut, meliputi pemenuhan kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, air bersih, pertanahan, pekerjaan, perumahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup; rasa aman dari ancaman atau perlakuan tindak kekerasan; akses untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik (dalam Okuputra dan Nasikh, 2022).

Walaupun kemiskinan dapat dilihat sebagai masalah multidimensi karena berkaitan dengan ketidak mampuan secara ekonomi, sosial dan budaya, politik dan partisipasi dalam masyarakat. Miskin memiliki arti yang luas dari sekedar lebih

rendahnya tingkat pendapatan atau komsumsi seseorang dari standar kesejateraan diukur sebagai kebutuhan kalori minimum atau garis kemiskinan, akan tetapi kemiskinan memiliki arti yang lebih dalam karena berkaitan dengan ketidakmampuan untuk mencapai aspek diluar pendapatan.

Permasalahan kemiskinan di Indonesia masih bersifat krusial tidak hanya dilihat dari angkanya yang terus meningkat, akan tetapi juga konsekuensinya yang akan mempengaruhi berbagai sektor, seperti kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya. Dengan demikian, pengentasan masalah kemiskinan sudah sewajarnya menjadi prioritas utama dalam pembangunan ekonomi baik jangka pendek maupun jangka panjang (Arifin, 2019). Dampak negatif dari adanya kemiskinan pada sektor sosial, yaitu kejahatan, seseorang akan melakukan kejahatan karena mereka tidak memiliki apa yang menjadi kebutuhannya (Jacobus, *et al.*, 2018).

Kemiskinan disebut sebagai masalah sosial, dan bahkan merupakan masalah sosial yang paling rumit dan sulit karena kemiskinan mendatangkan berbagai gangguan terhadap kehidupan bermasyarakat. Ini tampak jelas dari fakta-fakta bahwa sebagian besar kejahatan terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kemiskinan. Kasus-kasus seperti pencurian dan perampokan, misalnya, terkait langsung dengan kemiskinan, sedangkan kasus-kasus seperti pengangguran dan kondisi kesehatan yang buruk dengan segala konsekuensinya terkait secara tidak langsung dengan kemiskinan, karena masyarakat miskin tidak mampu mendapatkan pendidikan yang memadai dan makanan yang bergizi.

Banyak negara berkembang yang dalam sejarah pembangunannya mempunyai *good record* dalam pencapaian pembangunan ekonomi mereka, tetapi gagal dalam memperbaiki tingkat kesejahteraan sosial bagi masyarakatnya. Pembangunan yang hanya menitikberatkan pada kemajuan ekonomi semata telah terbukti tidak hanya memberikan hasil yang tidak maksimal dari proses pembangunan itu sendiri tetapi juga memperlihatkan banyak terjadi ketimpangan atau kesenjangan di dalam masyarakat.

Oleh karena itu, faktor sosial atau kependudukan merupakan aspek yang sangat strategis dalam kerangka pembangunan nasional. Hal ini dikarenakan kependudukan atau dalam hal ini adalah penduduk, merupakan pusat dari seluruh kebijakan dan program pembangunan yang akan dilakukan. Peningkatan taraf kesejahteraan sosial penduduk merupakan salah satu cara untuk merealisasikan cita-cita luhur kemerdekaan, yakni untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembangunan yang berorientasi hanya pada ekonomi menyisakan banyak masalah krusial seperti kemiskinan, pengangguran dan juga ketidakmerataan dari hasil-hasil pembangunan.

Belajar dari kegagalan pembangunan sebelumnya, sejak tahun 1980-an mulai berkembang kesadaran mengenai pembangunan sosial yang harus seiring sejalan dengan pembangunan ekonomi. Dalam pembangunan sosial, fokus terhadap peningkatan mutu sumber daya manusia menjadi sama penting dengan pembangunan ekonomi. Dengan demikian, pembangunan sosial atau masyarakat menjadi sarana untuk menggapai tujuan yang diharapkan, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang secara tak langsung akan mengurangi tingkat kemiskinan yang ada (Pramesti & Bendesa, 2018).

Dalam analisis pembangunan, penduduk merupakan salah satu variabel yang memegang peranan penting. Penduduk adalah sumber daya dan aset jangka panjang. Sebuah perencanaan pembangunan di suatu daerah akan memberikan hasil yang maksimal jika para stakeholder memperhatikan masalah kependudukan di wilayah mereka. Pembangunan yang menfokuskan pada peningkatan kualitas penduduk akan memberikan dampak yang positif terhadap pembangunan di sebuah wilayah, karena

dengan besarnya jumlah penduduk yang berkualitas akan menjadi modal pembangunan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang secara tak langsung akan mengurangi tingkat kemiskinan yang ada.

Masalah kemiskinan merupakan persoalan mendasar yang menjadi perhatian pemerintah, dan upaya pengentasan kemiskinan adalah salah satu aspek penting mencapai kesejahteraan rakyat. Hal ini sesuai dengan intruksi Presiden dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, pada pasal 1 ayat 1 menerangkan bahwa penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Hingga saat ini, upaya untuk menanggulangi kemiskinan telah menjadi agenda tahunan bagi pemerintah. Usaha tersebut tercermin dalam kebijakan yang dibentuk. Kebijakan tersebut meliputi kebijakan sosial dan kebijakan ekonomi. Untuk upaya penanggulangan kemiskinan, kebijakan yang dibentuk lebih mengarah kepada kebijakan sosial. Oleh pemerintah, kebijakan sosial tersebut merupakan langkah awal untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi yang dialami oleh penduduk miskin.

Telah banyak program yang dianggap prorakyat oleh pemerintah. Di antara program tersebut adalah penyediaan kebutuhan dasar seperti pangan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan dalam bidang pertanian, pemberian dana bergulir melalui sistem kredit, pembangunan prasarana dan pendampingan, sanitasi, serta program lainnya. Belum lagi berbagai program subsidi bagi masyarakat tidak mampu telah dilakukan. Semua itu untuk dilakukan agar diperoleh target penurunan kemiskinan yang sesuai harapan (Ardian & Destanto, 2020).

Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan kemiskinan serta dapat mewujudkan kesejahteraan bagi warga negaranya adalah dengan pemberian bantuan sosial. Salah satu bantuan sosial (Bansos) yang dicanangkan adalah Program Keluarga Harapan yang kemudian dikenal dengan PKH. PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Rumah Tangga Miskin (RTM) yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. Program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang merupakan salah satu instansi pemerintah yang bergerak di bidang sosial.

Program Keluarga Harapan merupakan Program yang di buat oleh Kementerian Sosial RI yang berlandaskan pada keputusan dari Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Program ini merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan sistem perlindungan sosial yang bertujuan untuk mensejahterakan warga miskin. Program Keluarga Harapan mempunyai tujuan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial serta mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan sekaligus menciptakan perubahan perilaku serta kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi.

Desa Baturotok yang berada di Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu wilayah yang perkembangan perekonomiannya pesat. Namun ditengah pesatnya perkembangan perekonomian yang terjadi, tingkat pengangguran dan jumlah penduduk miskin masih sangat tinggi. Permasalahan kemiskinan masih menjadi pokok persoalan yang harus mendapatkan perhatian ekstra. Hal itu dikarenakan kemiskinan di Desa Baturotok telah memberikan dampak pada rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan yang disebabkan terbatasnya kemampuan ekonomi masyarakat. Keterbatasan ekonomi

mengakibatkan sulitnya masyarakat dalam memperoleh fasilitas pendidikan yang lebih tinggi dan kesehatan yang layak sehingga menyebabkan semakin tinggi instabilitas kondisi sosial masyarakat.

Hal ini sesuai dengan pandangan Hutajulu, *et al.* (2021) yang menyatakan bahwa kemiskinan merupakan masalah utama dalam poin SDGs karena dapat membawa dampak negatif yang sangat banyak dan akan mempengaruhi berbagai sektor seperti kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya. Beberapa dampak negatif yang banyak terlihat sebagai akibat dari kemiskinan adalah meningkatnya tindak kriminal, gangguan kesehatan, pengangguran, rendahnya pembangunan manusia, kesenjangan, memperlambat kemajuan bangsa dan sebagainya.

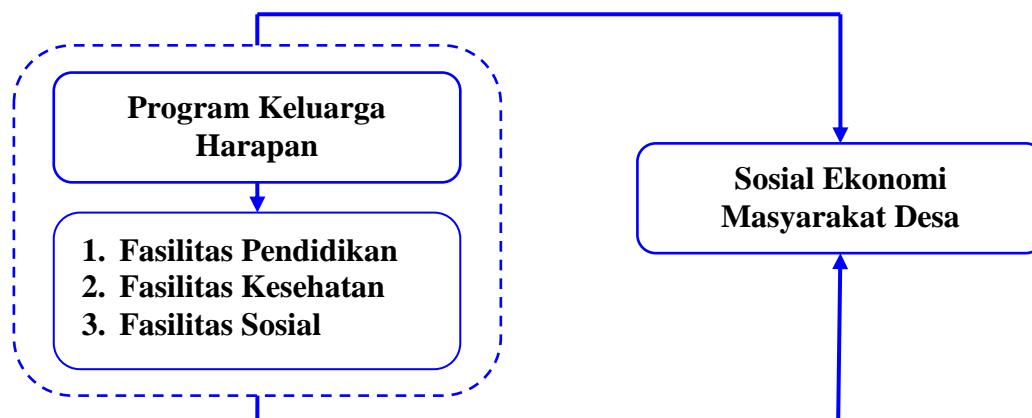
Oleh karena itu, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan sosial dan ekonomi masyarakat di Desa Baturrotok adalah dengan pemberian bantuan sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH). PKH yang secara nasional telah dilaksanakan sejak tahun 2007, namun di Kabupaten Sumbawa baru dapat dilaksanakan sejak tahun 2013. Bersamaan dengan keputusan dari pemerintah di tahun 2013, sebanyak 24 kecamatan di Kabupaten Sumbawa mulai menerima bantuan PKH dan salah salah satu desa yang mendapatkannya adalah Desa Baturrotok.

Jumlah penduduk miskin di Desa Baturrotok adalah sebanyak 693 Kepala Keluarga, sedangkan penduduk miskin yang menerima manfaat dari PKH sejak pertama kali digulirkan hingga saat ini berjumlah 345 Kepala Keluarga. Data ini menunjukkan bahwa masih banyak keluarga miskin yang belum mendapatkan manfaat dari PKH. Hal itu disebabkan PKH belum dapat terealisasikan dengan baik dan tepat sasaran sehingga belum mampu mengurangi tingkat kemiskinan di Desa Baturrotok.

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan oleh penulis, menjadi keinginan kuat bagi penulis untuk mengkaji secara lebih mendalam tentang efektivitas Program Keluarga Harapan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan PKH dalam memberikan kontribusi membantu rumah tangga miskin penerima manfaat untuk memperoleh fasilitas pendidikan dan kesehatan yang layak.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Menurut Bungin (2018), penelitian deskriptif kuantitatif adalah penelitian yang menggambarkan variabel secara apa adanya didukung dengan data-data berupa angka yang dihasilkan dari keadaan sebenarnya. Pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui efektivitas program keluarga harapan dalam meningkatkan sosial ekonomi masyarakat desa. Adapun desain dan kerangka pikir penelitian ini disajikan dalam gambar berikut ini.



Gambar 1. Desain dan Kerangka Pikir Penelitian



Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang diperoleh secara langsung dari sumber primer. Menurut Sugiyono (2020), data kuantitatif merupakan jenis data yang dapat diukur (*measurable*) atau dihitung secara langsung sebagai variabel angka atau bilangan, sedangkan data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti dari orang yang bersangkutan. Dalam penelitian ini, jenis data kuantitatif yang digunakan berupa skor persepsi responden terkait efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan sosial ekonomi masyarakat desa yang diperoleh secara langsung melalui kuesioner.

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) yang berada di Desa Baturrotok yang berjumlah 345 kepala keluarga. Melihat jumlah keluarga penerima manfaat PKH di Desa Batu Rotok yang relative besar sehingga tidak memungkinkan bagi peneliti untuk mempelajari semua elemen yang ada pada populasi, maka peneliti memilih beberapa karakteristik untuk mewakili populasi menjadi sampel. Pada penelitian ini, jumlah sampel yang akan dijadikan sebagai responden adalah sebesar 10% dari total populasi yang ada. Hal ini sesuai dengan pandangan Arikunto (2019) yang menyatakan bahwa apabila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel atau perwakilan yang diambil dari populasi. Peneliti dapat mengambil perwakilan 10-15% atau 20-25% dari jumlah populasinya. Berikut formulasi perhitungannya.

$$n = N \times 10\%$$

Keterangan:

n : Ukuran sampel

N : Ukuran populasi

10% : Ukuran sampel yang distandarkan (Arikunto, 2019).

Berikut perhitungannya.

$$n = N \times 10\%$$

$$n = 345 \times 10\%$$

$$n = 34,5 (35)$$

Berdasarkan perhitungan sampel yang telah dilakukan menggunakan ukuran 10% yang distandarkan, diperoleh hasil sebesar 34,5 yang dibulatkan menjadi 35 sehingga jumlah sampel yang akan dijadikan sebagai responden adalah sebanyak 35 masyarakat di Desa Baturrotok. Jumlah tersebut diharapkan dapat merepresentasikan karakteristik dari populasi.

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan instrument penelitian berupa kuesioner. Menurut Sugiarwani (2020), kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner disusun menggunakan skala Gutman, yaitu skala pengukuran untuk memperoleh jawaban yang tegas diantaranya Ya dan Tidak. Data yang diperoleh berupa data interval atau rasio dikotomi (dua alternatif). Pada kuesioner ini, jika responden menjawab Ya, maka diberi skor 1 dan jika responden menjawab Tidak, maka diberi skor 0.

Untuk mengukur tingkat efektivitas program digunakan metode statistik sederhana, yaitu (Subagyo dalam Putri, et al., 2021):

$$\text{Efektivitas program} = \frac{R}{T} \times 100$$

Keterangan :

R = Jumlah skor Jawaban

T = Jumlah responden

Menurut Budiani (dalam Hanun dan Kurniawan, 2021), dalam mengukur tingkat efektivitas program dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sebagai berikut:

1. Ketepatan sasaran program
2. Sosialisasi program
3. Tujuan program
4. Pemantauan program.

Pengklasifikasian tingkat efektivitas program dapat dilakukan dengan menggunakan standar sesuai dengan acuan Litbang Depdagri (1991) sebagaimana tabel berikut ini (dalam Rahmadillah, 2022).

Tabel 1. Standar Ukuran Efektivitas Sesuai Acuan Litbag Depdagri

Rasio Efektivitas (%)	Tingkat Capaian
< 40	Sangat Tidak Efektif
40 – 60	Tidak Efektif
60 – 80	Cukup Efektif
> 80	Sangat Efektif

Sumber: Litbang Depdagri, 1991.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyajian Hasil Penelitian

Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai atau tidaknya sasaran yang telah ditetapkan, Menurut Sedarmayanti (dalam Mamonto, et al., 2022) menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Berdasarkan pengertian tersebut, maka efektivitas dapat dikatakan sebagai sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Pada penelitian ini, untuk mengetahui tingkat keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan sosial ekonomi masyarakat Desa Baturrotok, peneliti menggunakan indikator efektivitas, yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program.

1. Tingkat Ketepatan Sasaran Program PKH di Desa Baturrotok

Berdasarkan hasil perhitungan tingkat ketepatan sasaran program PKH di Desa Baturrotok dengan menggunakan metode statistik sederhana yang telah dijelaskan sebelumnya, diperoleh hasil yang disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. Persepsi Responden Mengenai Ketepatan Sasaran Program PKH di Desa Baturrotok

No	Keterangan	Total	Persentase (%)
1	Tepat Sasaran	29	82,86
2	Tidak Tepat Sasaran	6	17,14
Jumlah		35	100,00

Sumber: Data primer (diolah), 2023.

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat diketahui bahwa total skor persepsi responden terkait ketepatan sasaran program PKH di Desa Baturrotok adalah sebesar 82,86%. Sesuai dengan ukuran efektivitas mengacu pada standar Litbag Depdagri, maka tingkat ketepatan sasaran program PKH di Desa Baturrotok berada pada kategori sangat efektif. Hal ini mengandung arti bahwa bantuan PKH telah diberikan kepada rumah tangga sesuai dengan ketentuan dan kriteria penerima PKH yang dipersyaratkan sehingga masyarakat penerima manfaat dari PKH dapat memperoleh kemudahan dalam mengakses fasilitas pendidikan dan kesehatan yang layak. Fasilitas pendidikan dan kesehatan yang baik menjadi sangat penting karena penduduk yang berkualitas adalah sumber daya dan aset pembangunan jangka panjang. Sebaik apapun sarana pembangunan akan menjadi sia-sia, jika tidak didukung sumber daya manusia yang berkualitas dalam menjalankannya. Oleh karena itu, untuk meningkatkan sosial dan ekonomi masyarakat harus berfokus terhadap peningkatan mutu sumber daya manusia melalui pembangunan layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial.

2. Sosialisasi Program PKH di Desa Baturrotok

Berdasarkan hasil perhitungan mengenai efektifitas kegiatan sosialisasi program PKH di Desa Baturrotok dengan menggunakan metode statistik sederhana yang telah dijelaskan sebelumnya, diperoleh hasil yang disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3. Persepsi Responden Mengenai Efektifitas Kegiatan Sosialisasi Program PKH di Desa Baturrotok

No	Keterangan	Total	Persentase (%)
1	Sosialisasi Program Baik	27	77,14
2	Sosialisasi Program Buruk	8	22,86
Jumlah		35	100,00

Sumber: Data primer (diolah), 2023.

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat diketahui bahwa total skor persepsi responden terkait efektifitas kegiatan sosialisasi program PKH di Desa Baturrotok adalah sebesar 77,14%. Sesuai dengan ukuran efektivitas mengacu pada standar Litbag Depdagri, maka tingkat efektifitas kegiatan sosialisasi program PKH di Desa Baturrotok berada pada kategori cukup efektif. Hal ini mengandung arti bahwa kegiatan sosialisasi program bantuan PKH telah dilakukan dengan cukup baik. Melalui kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan, masyarakat memperoleh informasi mengenai ketentuan dan kriteria penerima PKH yang dipersyaratkan sehingga dapat mengetahui siapa saja yang layak menerima manfaat dari program tersebut.

3. Tujuan Program PKH di Desa Baturrotok

Berdasarkan hasil perhitungan mengenai tingkat ketercapaian tujuan program PKH di Desa Baturrotok dengan menggunakan metode statistik sederhana yang telah dijelaskan sebelumnya, diperoleh hasil yang disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 4. Persepsi Responden Mengenai Tingkat Ketercapaian Tujuan Program PKH di Desa Baturrotok

No	Keterangan	Total	Persentase (%)
1	Tujuan Tercapai	30	85,71
2	Tujuan Tidak Tercapai	5	14,29
Jumlah		35	100,00

Sumber: Data primer (diolah), 2023.

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat diketahui bahwa total skor persepsi responden mengenai tingkat ketercapaian tujuan program PKH di Desa Baturrotok adalah sebesar 85,71%. Sesuai dengan ukuran efektivitas mengacu pada standar Litbag Depdagri, maka tingkat ketercapaian tujuan program PKH di Desa Baturrotok berada pada kategori sangat efektif. Artinya, dengan adanya program PKH kelompok rumah tangga sangat miskin/ keluarga sangat miskin yang menjadi sasarnya dapat memiliki akses untuk memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya sehingga diharapkan sosial dan ekonomi masyarakat dapat meningkat sesuai dengan tujuan pemberian bantuan sosial PKH.

4. Pemantauan Program PKH di Desa Baturrotok

Berdasarkan hasil perhitungan mengenai efektifitas kegiatan pemantauan program PKH di Desa Baturrotok dengan menggunakan metode statistik sederhana yang telah dijelaskan sebelumnya, diperoleh hasil yang disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 5. Persepsi Responden Mengenai Efektifitas Kegiatan Pemantauan Program PKH di Desa Baturrotok

No	Keterangan	Total	Persentase (%)
1	Pemantauan Program Baik	26	74,29
2	Pemantauan Program Buruk	9	25,71
Jumlah		35	100,00

Sumber: Data primer (diolah), 2023.

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat diketahui bahwa total skor persepsi responden mengenai efektifitas kegiatan pemantauan program PKH di Desa Baturrotok adalah sebesar 74,29%. Sesuai dengan ukuran efektivitas mengacu pada standar Litbag Depdagri, maka tingkat efektifitas kegiatan pemantauan program PKH di Desa Baturrotok berada pada kategori cukup efektif. Hasil ini menunjukkan bahwa kegiatan pemantauan program PKH di Desa Baturrotok telah dilakukan dengan cukup baik untuk menjamin keberhasilan pengelolaan kegiatan serta tingkat ketercapaian dari pelaksanaan program PKH. Kegiatan pemantauan ini menjadi bagian yang sangat penting untuk menilai tingkat kesesuaian antara pelaksanaan dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya. Selain itu, kegiatan pemantauan juga bertujuan untuk mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin sehingga tujuan pemberian bantuan sosial PKH, yaitu untuk meningkatkan sosial ekonomi masyarakat dapat tercapai secara optimal.

5. Efektivitas Program PKH Dalam Meningkatkan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Baturrotok

Berdasarkan hasil perhitungan efektivitas program PKH dalam meningkatkan sosial ekonomi masyarakat Desa Baturrotok dengan menggunakan indikator ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program, maka diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 6. Efektivitas Program PKH Dalam Meningkatkan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Baturrotok

No	Keterangan	Target	Realisasi	Percentase (%)	Kategori
1	Ketepatan Sasaran Program	35	29	82,86	Sangat Efektif
2	Sosialisasi Program	35	27	77,14	Cukup Efektif
3	Tujuan Program	35	30	85,71	Sangat Efektif
4	Pemantauan Program	35	26	74,29	Cukup Efektif
	Jumlah	140	112	320,00	
	Rata-rata	35	28	80,00	Cukup Efektif

Sumber: Data primer (diolah), 2023.

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat diketahui bahwa skor rata-rata persepsi responden mengenai efektifitas kegiatan program PKH adalah sebesar 80,00%. Sesuai dengan ukuran efektivitas mengacu pada standar Litbag Depdagri, maka tingkat efektifitas program PKH dalam meningkatkan sosial ekonomi masyarakat Desa Baturrotok berada pada kategori cukup efektif. Hasil ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program PKH di Desa Baturrotok telah dilaksanakan dengan cukup baik, meskipun masih diperlukan perbaikan dan peningkatan pada beberapa aspek, yaitu kegiatan sosialisasi dan pemantauan program PKH. Keberhasilan dalam pelaksanaan program PKH ini sangat penting agar masyarakat miskin dapat memperoleh manfaat terutama akses pada bidang pendidikan, kesehatan dan sosial sehingga tujuan dari program PKH dalam meningkatkan sosial ekonomi masyarakat dapat tercapai secara optimal.

Pembahasan

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka.

Melalui PKH, kelompok rumah tangga sangat miskin/ keluarga sangat miskin didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi episentrum dan *center of excellence* penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

Keberhasilan dalam pelaksanaan program PKH ini sangat penting mengingat besarnya kontribusi yang diberikan program PKH ini bagi masyarakat miskin agar dapat memperoleh manfaat terutama akses pada bidang pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, pelaksanaan program ini harus dilaksanakan secara efektif sehingga tujuan dari program PKH dalam meningkatkan sosial ekonomi masyarakat dapat tercapai secara optimal.

Suatu program yang dijalankan dapat dikatakan efektif apabila mampu mencapai tujuan yang ingin dicapai dan memenuhi target yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan yang baik. Untuk menilai efektivitas suatu program perlu dilakukan agar

dapat mengetahui sejauhmana dampak dan manfaat yang di hasilkan oleh program tersebut. karena efektifnya suatu program merupakan gambaran keberhasilan organisasi dalam tercapainya sasaran yang telah ditetapkan.

Penilaian efektivitas suatu program harus dilakukan agar dapat mengetahui sejauh mana dampak atau manfaat yang dihasilkan oleh program yang telah dilaksanakan, sehingga melalui pengukuran efektivitas ini dapat menjadi pertimbangan mengenai program tersebut. Menurut Budiani (dalam Pratiwi dan Nurcahyanto, 2017), menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut, yaitu ketetapan sasaran program, sosialisasi program, ketepatan tujuan program, dan pemantauan program.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas program keluarga harapan (PKH) dalam meningkatkan sosial ekonomi masyarakat Desa Baturrotok. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektifitas program PKH dalam meningkatkan sosial ekonomi masyarakat Desa Baturrotok berada pada kategori cukup efektif. Hal ini mengandung arti bahwa pelaksanaan program PKH di Desa Baturrotok telah dilaksanakan dengan cukup baik, meskipun masih diperlukan perbaikan dan peningkatan pada beberapa aspek, yaitu kegiatan sosialisasi dan pemantauan program PKH. Keberhasilan dalam pelaksanaan program PKH ini sangat penting agar masyarakat miskin dapat memperoleh manfaat terutama akses pada bidang pendidikan dan kesehatan sehingga tujuan dari program PKH dalam meningkatkan sosial ekonomi masyarakat dapat tercapai secara optimal.

Ketetapan sasaran program dikatakan sangat efektif, hal ini disebabkan meskipun ada beberapa masyarakat miskin yang belum mendapatkan bantuan PKH di Desa Baturrotok, melalui kebijakan pemerintah desa, kelompok masyarakat miskin tersebut akan dialihkan kepada bantuan sosial lainnya, seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bantuan jaminan kesehatan nasional, dan lain-lain. Selain itu, masyarakat penerima manfaat program PKH merasa puas karena bantuan PKH diterima KPM sesuai dengan ketentuan tanpa adanya potongan, hal ini dikarenakan bantuan PKH akan langsung masuk ke rekening yang dipegang oleh KPM.

Sosialisasi program dikatakan cukup efektif, hal ini dikarenakan walaupun berada di daerah terpencil, pendamping dan juga petugas PKH tetap memastikan bahwa sosialisasi diadakan setiap tiga bulan sekali, serta memastikan KPM memahami dengan baik manfaat dan tujuan PKH, hak dan kewajiban, serta sanksi yang didapat apabila melanggar kewajiban sebagai KPM PKH.

Tujuan program dikatakan sangat efektif, hal ini dikarenakan kualitas pendidikan dan kesehatan di Desa Baturrotok membaik. Masyarakat penerima manfaat program PKH di Desa Baturrotok mengaku walaupun mereka berada di daerah terpencil, melalui dana bantuan sosial PKH mereka dapat memperoleh akses fasilitas pendidikan dan kesehatan yang layak dan memadai sehingga diharapkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat meningkat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pemantauan program dikatakan cukup efektif, hal ini dikarenakan program KPM mengaku selama pelaksanaan program PKH tidak pernah ada kendala yang berarti. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan program PKH didukung oleh tenaga pendamping yang memiliki kemampuan yang baik dalam menjalankan PKH, serta selalu bersifat adil dan terbuka kepada KPM.

Hasil penelitian ini sesuai dengan pandangan Sutrisno (dalam Muin dan Rosdiana, 2020), yang menyatakan bahwa program PKH memiliki tujuan yaitu meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi keluarga miskin (jangka panjang), serta membantu mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin (jangka pendek). Program PKH adalah suatu program yang sangat



efektif untuk membantu Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, program PKH ini perlu penanganan yang lebih dan terpadu serta berkelanjutan sehingga upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan sosial ekonomi masyarakat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat tercapai secara optimal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nova Abizal, dkk. (2022) yang melakukan penelitian tentang Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Kecamatan Tangan-tangan Kabupaten Aceh Barat Daya). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program PKH sudah efektif karena program ini telah memenuhi beberapa kriteria indikator efektivitas seperti baiknya pemahaman peserta PKH terhadap program, tujuan program, waktu dan target penerima juga tercapai. Lebih penting lagi, program ini telah meningkatkan taraf hidup sebagian keluarga miskin di Kecamatan TanganTangan selama masa Pandemi Covid-19. Namun, beberapa kendala dalam pelaksanaannya adalah kurangnya koordinasi antara kepala desa dan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka disimpulkan bahwa tingkat efektifitas program PKH dalam meningkatkan sosial ekonomi masyarakat Desa Baturrotok berada pada kategori cukup efektif. Hal ini mengandung arti bahwa pelaksanaan program PKH di Desa Baturrotok telah dilaksanakan dengan cukup baik, meskipun masih diperlukan perbaikan dan peningkatan pada beberapa aspek, yaitu kegiatan sosialisasi dan pemantauan program PKH. Keberhasilan dalam pelaksanaan program PKH ini sangat penting agar masyarakat miskin dapat memperoleh manfaat terutama akses pada bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial sehingga tujuan dari program PKH dalam meningkatkan sosial ekonomi masyarakat dapat tercapai secara optimal.

SARAN

Adapun saran yang dapat peneliti berikan kepada berbagai pihak yang terkait dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa

Kepada pemerintah Desa Baturrotok diharapakan agar dapat melakukan evaluasi agar bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran serta tujuan. Hal itu dikarenakan program PKH merupakan langkah kongkret untuk membantu memberdayakan kaum marginal atau masyarakat miskin sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan sumberdaya manusia yang baik, berkompeten, dengan ditunjuk peningkatan kesehatan dan pendidikan yang memadai.

2. Bagi Keluarga Penerima Manfaat PKH

Diharapakan agar dapat menggunakan bantuan sesuai tujuannya dan jika merasa sudah mampu dalam berbagai aspek terutama ekonomi disarankan untuk dapat mandiri dan tidak mengharapkan bantuan terus menurus. Hal ini bertujuan agar alokasi dana bantuan sosial PKH dapat terdistribusikan secara merata dan manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak keluarga miskin guna meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan kemudahan akses pelayanan pendidikan, kesehatan, dan sosial bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abizal, N., Maimun, & Yulindawati. (2022). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Kecamatan Tangan-tangan Kabupaten Aceh Barat Daya). *IBES: Jurnal Ilmiah Basis Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 1(1): 55-70.
- Ardian, D., & Destanto, M.R. (2020). Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat. *Seminar Nasional Official Statistics 2020: Statistics in the New Normal: a Challenge of Big Data and Official Statistics*, (2020): 377-384.
- Arifin. (2019). Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Indonesia. *JAPABIS: Jurnal Administrasi Publik & Bisnis*, Vol. 1(2): 1-15.
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, B. (2018). *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hanun, M., & Kurniawan, I.D. (2021). Efektivitas Inovasi Paket Layanan Komplit Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar. *JIP: Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 2(3): 891-898.
- Hutajulu, D.M., Septiani, Y., & Simamora, J.M. (2021). Analisis Variabel Sosial Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *ISOQUANT: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 5(1): 108-127.
- Jacobus, E.H., Kindangen, P., & Walewangko, E.N. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga di Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, Vol. 19(3): 86-103.
- Mamonto, F.S., Gosal, R., & Kasenda, V. (2022). Efektivitas Penerapan E-Government Melalui Website Sideka Di Desa Poigar II Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Governance*. Vol. 2(1): 1-12.
- Muin, R., & Rosdiana. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Penerima Bantuan di Desa Laliko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar. *J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*, Vol. 5(2): 130-147.
- Okuputra, M.A., & Nasikh. (2022). Pengaruh Inovasi Daerah Terhadap Kemiskinan. *INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Manajemen*, Vol. 18(1): 159-166.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Putri, M.W., Ilhamsyah, Mutiah, N. (2021). Pengukuran Efektivitas Dan Efisiensi Penerapan Open Data System Menggunakan Model Delone And Mclean (Studi Kasus: Open Data System Pemerintah Kota Pontianak). *Coding: Jurnal Komputer dan Aplikasi*, Vol. 09(1): 12-22.
- Pramesti, N.A.T., & Bendesa, I.K.G. (2018). Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, Vol. 7(9): 1887-1917.



- Pratiwi, M., & Nurcahyanto, H. (2017). Efektivitas Program Bpjs Kesehatan Di Kota Semarang (Studi Kasus pada Pasien Pengguna Jasa BPJS Kesehatan di Puskesmas Srondol). *Journal of Public Policy And Management Review*, Vol. 6(2): 1-14.
- Rahmadillah, R. (2022). Efektifitas Alokasi Dana Dekonsentrasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Studi Kasus pada Provinsi Banten, Jawa Tengah, dan DIY). *Jurnal Ilmiah Publika*, Vol. 10(1): 91-101.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V.W. (2020). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru.